

MELURUSKAN MAKNA PT-BHMN

Prof. Dr. Sofian Effendi¹

Kalau kita ikuti dengan cermat wacana di media tentang pendidikan tinggi yang sudah berlangsung selama 2-3 minggu ini, kita mau tidak mau akan teringat pada buku berjudul “Trust” karangan Francis Fukuyama, seorang warganegara Amerika Serikat keturunan Jepang. Dalam bukunya itu, Fukuyama mencoba menjelaskan hubungan antara sifat dasar suatu bangsa dengan kemampuan bangsa tersebut untuk mencapai kemajuan ekonomi dan keunggulan iptek. Mengapa ada bangsa-bangsa yang cepat mencapai keunggulan iptek sehingga mampu meraih kemajuan ekonomi, mengapa ada yang sedang-sedang saja kemajuannya, dan ada pula bangsa yang tetap nggak maju-maju?

Menurut Fukuyama, perbedaan ini terjadi karena bangsa-bangsa tersebut mempunyai sifat pokok yang berbeda khususnya tingkat kepercayaan yang berbeda kepada sesama. Bangsa yang memiliki sifat dasarnya rasa percaya yang besar kepada individu dapat maju dengan cepat. Bangsa yang rasa percayanya sedang dan terbatas pada keluarga dan suku, agak lamban kemajuannya. Sedangkan bangsa yang rendah rasa percayanya sukar untuk mencapai kemajuan. Menurut penilaian Fukuyama bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki rasa percaya yang rendah. Karena itu lamban kemajuannya.

Celakanya, kecurigaan warga masyarakat, tak terkecuali warga masyarakat akademik yang sudah lebih terpelajar, pada PT-BHMN nampaknya cenderung membenarkan hipotesis Fukuyama. BHMN tersebut sebenarnya hanyalah suatu “*legal entity*”, suatu bentuk badan hukum yang digunakan untuk membedakan PTN tertentu dengan bentuk instansi pemerintah yang merupakan bentuk PTN. Sebagai badan hukum yang terpisah dari instansi pemerintah, PT-BHMN rencananya akan memperoleh otoritas yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Seperti halnya PTN, PT-BHMN akan mendapat subsidi – atau DAU pada daerah otonom - dari pemerintah dan subsidi itu belum tentu lebih kecil dari anggaran pada saat BHMN tersebut masih menjadi PTN. Misalnya, subsidi Pemerintah kepada UGM setelah menjadi PT-BHMN bahkan naik sebesar 15 persen dari sebelumnya. Biaya untuk mendidik seorang mahasiswa S-1 di UGM saat ini adalah Rp. 11 juta per tahun. Biaya tersebut masih mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 60 persen, subsidi silang dari universitas sebesar 31 persen dan dari SPP dan BOP sebesar 9 persen. Dengan kata lain, setiap mahasiswa S-1 di UGM mendapat subsidi dari rakyat sebesar 91 persen.

Apakah subsidi sebesar 91 persen itu mampu meningkatkan akses calon mahasiswa berbakat dari keluarga kurang mampu ke UGM? Seperti terjadi dimana-mana dan dalam berbagai pelayanan pemerintah, ternyata hanya 6 persen anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil masuk ke UGM dan 76 persen dari keluarga mampu. Ternyata,

¹ Gurubesar Kebijakan Publik dan Rektor UGM

misi kerakyatan UGM tidak tercapai melalui pemerataan subsidi. Yang terjadi justru yang mampu diberi subsidi.

Karena Pemerintah tidak memberikan prioritas yang tinggi pada bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah Indonesia untuk bidang pendidikan mungkin yang terendah di antara negara-negara Asean. Di negara kita pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi pada 2003 adalah Rp. 4,3 trilyun atau hanya 0,25 persen dari PDB dan sekitar 1,2 persen dari APBN. RCC yang menempatkan pendidikan tinggi pada prioritas tinggi mengalokasikan hampir 2,5 persen dari PDB nya. Demikian juga Malaysia dan Singapura.

Karena itu jangan heran kalau biaya pendidikan per mahasiswa di Negara jiran ini 14 kali lebih tinggi dari satuan biaya di UGM. Gaji guru dan dosen di sana 20 kali standar gaji Indonesia. Karena biaya pendidikan yang mencukupi, kualitas pendidikan di PT Malaysia memang tinggi dan lulusannya akan mampu menandingi lulusan PT dari negeri manapun.

Rendahnya biaya pendidikan ini dihadapi oleh semua PTN dan PTS, bukan hanya oleh PT-BHMN. Karena itu saya heran sekali ada pandangan dari masyarakat bahwa UGM menjadi bertambah mahal setelah menjadi PT-BHMN.

Yogyakarta, 20 Juni 2003